



**LAPORAN BULANAN SIDANG PARIPURNA
BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN
BULAN MARET 2017**

Pendahuluan

Komnas HAM dapat dikatakan merupakan lembaga pertahanan terakhir bagi warga sipil untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang diduga diambil alih oleh Negara / Korporasi / Kelompok Bersenjata. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam memenuhi permintaan warga tersebut ada dalam fungsi penegakan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian fungsi pokok Komnas HAM yang paling dikenal dan dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia adalah menerima dan memeriksa kasus atau peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Komnas HAM jelas berwenang untuk menerima pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM, sepanjang pengaduan tersebut disampaikan sesuai dengan tata cara dan prosedur pengaduan yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bersama ini dilaporkan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bagian Dukungan Pelayanan Pelayanan Pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

A. Laporan Data Penerimaan Pengaduan

Pada 1 sampai dengan 31 Maret 2017, Komnas HAM melalui Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah menerima berkas pengaduan dengan jumlah **378 berkas**.

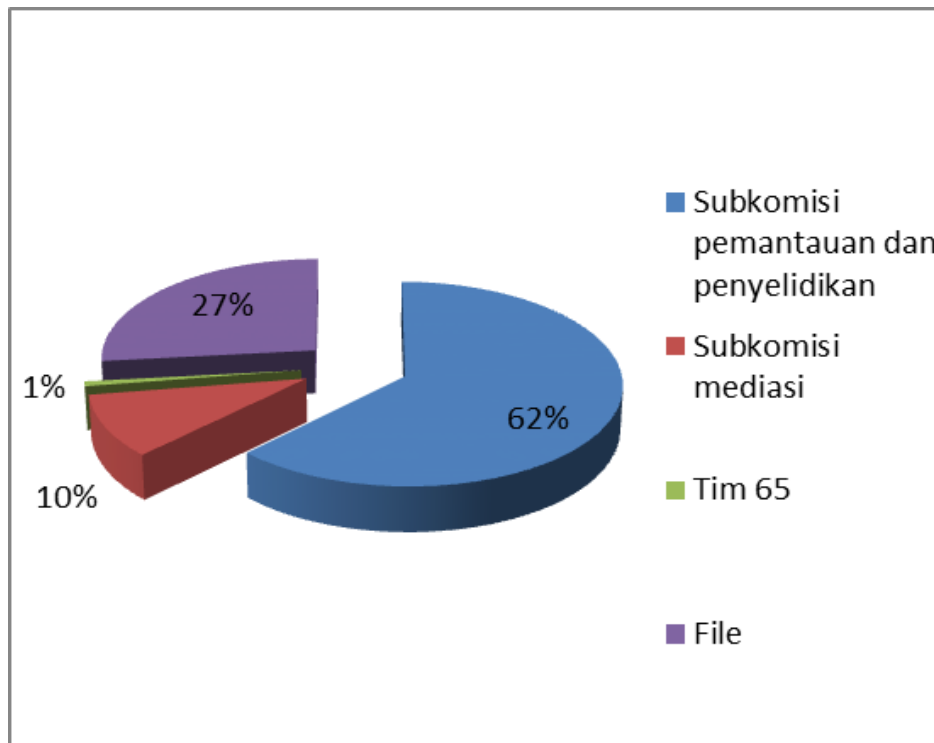
Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Wilayah asal pengadu / pelapor

No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah	No	Wilayah Asal Pengadu / Pelapor	Jumlah
1	Aceh	1	20	Kalimantan Barat	3
2	Sumatera Utara	22	21	Kalimantan Selatan	2
3	Bengkulu	4	22	Kalimantan Tengah	1
4	Jambi	5	23	Kalimantan Timur	8
5	Riau	15	24	Kalimantan Utara	1
6	Sumatera Barat	17	25	Gorontalo	
7	Sumatera Selatan	10	26	Sulawesi Selatan	11
8	Lampung	3	27	Sulawesi Tenggara	3
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	28	Sulawesi Tengah	11
10	Kepulauan Riau	4	29	Sulawesi Utara	4
11	Banten	7	30	Sulawesi Barat	
12	Jawa Barat	24	31	Sulawesi Selatan Barat	
13	DKI Jakarta	84	32	Maluku	26
14	Jawa Tengah	23	33	Maluku Utara	
15	Jawa Timur	26	34	Papua	7
16	Daerah Istimewa Yogyakarta	7	35	Papua Barat	
17	Bali	4	36	Tanpa Alamat	34
18	Nusa Tenggara Barat	3			
19	Nusa Tenggara Timur	7		Jumlah	378

2. Distribusi berkas pengaduan

No	Distribusi Berkas Pengaduan	Jumlah Berkas
1	Subkomisi pemantauan dan penyelidikan	236
2	Subkomisi mediasi	38
3	Tim 65	3
4	File	101
Jumlah		378



3. Jenis berkas pengaduan

No	Jenis Surat	Jumlah berkas
1	Langsung	222
2	Tembusan	154
3	Tidak ditujukan/ ditembuskan ke KH	2
Jumlah		378

4. Cara penyampaian berkas

No	Cara Penyampaian	Jumlah berkas
1	Datang langsung	39
2	Pos	291
3	Fax	4
4	Email	38
5	Online	3
6	Audiensi	2
7	Diterima di lapangan / inisiatif / proaktif/ Kondisi Khusus	1
Jumlah		378

5. Klasifikasi hak

No	Klasifikasi / Tema Hak	Jumlah berkas
1	Hak untuk hidup	12
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	
3	Hak mengembangkan diri	5
4	Hak memperoleh keadilan	127
5	Hak atas kebebasan pribadi	11
6	Hak atas rasa aman	30
7	Hak atas kesejahteraan	156
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	8
9	Hak perempuan	
10	Hak anak	
11	Hak tidak diperlakukan diskriminatif	
12	Non HAM	29
Jumlah		378

5.1. Klasifikasi pengaduan

I. Hak Untuk Hidup	Jumlah berkas
Mempertahankan hidup	6
Lingkungan hidup	6
	12
II. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	Jumlah berkas
Pengabaian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	
	0
III. Hak mengembangkan diri	Jumlah berkas
Hak atas pendidikan	4
Hak atas kebebasan mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya	1
	5
IV. Hak memperoleh keadilan	Jumlah berkas
Kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS	89
Kesewenang-wenangan proses hukum di kejaksaan	9
Kesewenang-wenangan proses hukum di pengadilan	25
Kesewenang-wenangan pemenuhan hak terhadap warga binaan / narapidana	4
	127

V. Hak atas kebebasan pribadi	Jumlah berkas
Keutuhan pribadi	
Kebebasan beragama dan berkeyakinan	4
Mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat	3
Berkumpul, berapat, dan berserikat	
Pembatasan pendirian kelompok atau organisasi	2
Menyampaikan pendapat di muka umum	2
Status kewarganegaraan	
Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah RI	
	11
VI. Hak atas rasa aman	Jumlah berkas
Mencari suka	
Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya	7
Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	4
Hak atas kebebasan gangguan terhadap tempat tinggal	4
Hak atas kerahasiaan dalam hubungan surat menyurat	
Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan	8
Bebas dari kesewenang-wenangan penangkapan, penahanan, pengucilan, pengasingan, atau pembuangan	7
	30
VII. Hak atas kesejahteraan	Jumlah berkas
Hak untuk mempunyai milik	4
Hak atas kepemilikan tanah	72
Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	28
Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	15
Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak	28
Hak atas kesehatan	6
Pengabaian pemenuhan hak buruh migran	3
	156
VIII. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan	Jumlah berkas
Hak dipilih dan memilih dalam pemilu	3
Hak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil	2

Hak mengajukan pengaduan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih	3
	8
IX. Hak perempuan	Jumlah berkas
Hak keterwakilan perempuan dalam pemilu serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif	
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran	
Memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan dan jabatan	
Hak mendapatkan perlindungan khusus berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan	
Hak atas kesetaraan dengan suami	
	0
X. Hak anak	Jumlah berkas
Pengabaian terhadap hak kelangsungan hidup	
Pengabaian terhadap hak mendapatkan perlindungan	
Pengabaian terhadap hak untuk tumbuh kembang	
Pengabaian terhadap hak untuk berpartisipasi	
	0
XI. Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif	Jumlah berkas
Pemberlakuan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis	
Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis	
	0
XII. Non HAM	Jumlah berkas
Non Ham	29
Jumlah Seluruh	378

6. Klasifikasi korban

No	Klasifikasi Korban	Jumlah berkas
1	Korporasi	3
2	Individu - Orang seorang	175
3	Individu - Anak	4
4	Individu - Perempuan	5
5	Individu - Buruh migran	2
6	Individu - Pekerja/Profesi	15
7	Individu - Suku	
8	Individu - Ras dan etnis	

9	Individu - Agama dan penghayat kepercayaan	
10	Individu - Penyandang cacat	3
11	Individu - LGBT	
12	Individu - Teroris	
13	Individu - Korban pelanggaran HAM masa lalu	2
14	Individu - Lansia	1
15	Individu - Fakir Miskin	
16	Individu - Narapidana	1
17	Kelompok - Masyarakat	93
18	Kelompok - Anak anak	1
19	Kelompok - Perempuan	
20	Kelompok - Buruh Migran	
21	Kelompok - Pekerja	27
22	Kelompok - Masyarakat Adat	13
23	Kelompok - Ras dan Etnis	1
24	Kelompok - Agama dan penghayat kepercayaan	2
25	Kelompok - Penyandang Disabilitas	1
26	Kelompok - LGBT	
27	Kelompok - Teroris	
28	Kelompok - Korban pelanggaran HAM masa lalu	1
29	Kelompok - Lansia	
30	Kelompok - Fakir miskin	
31	Kelompok - Narapidana	
32	Organisasi	3
33	Warga Negara Asing (WNA)	4
34	Tanpa Keterangan Pihak Korban	21

7. Klasifikasi pihak yang diadukan

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah berkas
1	Pemerintah pusat (kementrian)	30
2	Pemerintah daerah	45
3	Lembaga legislatif	
4	Lembaga negara (non kementerian)	9
5	Lembaga peradilan	24
6	POLRI	108
7	TNI	24
8	Kejaksaan	12
9	Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara	4
10	Pemerintah negara lain	
11	Korporasi	57
12	BUMN/BUMD	19

13	Lembaga pelayanan kesehatan	1
14	Lembaga pendidikan	7
15	Individu - Orang seorang	7
16	Individu - Anak	
17	Individu - Perempuan	
18	Individu - Buruh migran	
19	Individu - Pekerja/Profesi	4
20	Kelompok - Masyarakat	2
21	Tanpa Keterangan Pihak yang Diadukan	25

8. Laporan berkas pengaduan yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi serta ditangani oleh Komisioner Otto Nur Abdullah

Sejak 2014 Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga menyusun dan mengeluarkan surat dengan maksud untuk (a) meminta kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 90 UU No 39 Tahun 1999¹, (b) surat keluar untuk berkas file yaitu berkas yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diprosesnya suatu berkas pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No 39 Tahun 1999² dan dinilai sebagai berkas yang tidak dan/atau belum ditemukan adanya bentuk pelanggaran HAM, dan (c) ucapan terima kasih. Kegiatan ini tetap dilaksanakan sampai dengan Maret 2017 sebagai salah satu kegiatan reguler dari Subbagian ini dengan perincian sebagai berikut:

Deskripsi berkas yang belum dan/atau tidak diteruskan ke Pemantauan atau Mediasi

Kategori surat keluar			Total jumlah berkas yang tidak diteruskan
Kelengkapan berkas	Bukan pelanggaran HAM	Ucapan terima kasih	
9	15	20	49

Surat keluar dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan ini diproses oleh Analis, diperiksa dan disetujui oleh Kabag. DPP, **diperiksa dan ditandatangani oleh Komisioner Otto Nur Abdullah.**

¹ Berkas dengan kategori kelengkapan berkas, segera setelah pengadu mengirimkan jenis kelengkapan berkas yang diminta, akan dikirimkan ke Bagian Pemantauan atau Mediasi

² Berkas dengan kategori file, tidak akan diteruskan ke Bagian Pemantauan atau Bagian Mediasi

9. Penomoran kasus untuk pengaduan baru 1 (satu) kali

Periode Maret 2017, Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan memberikan nomor kasus untuk berkas pengaduan baru 1 (satu) kali dengan perincian distribusi sebagai berikut:

Pemantauan	Mediasi	Jumlah
82	8	90

Jakarta, 3 April 2017

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

a.n. KEPALA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM

KEPALA BAGIAN DUKUNGAN PELAYANAN PENGADUAN

Rima Purnama Salim